

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2014

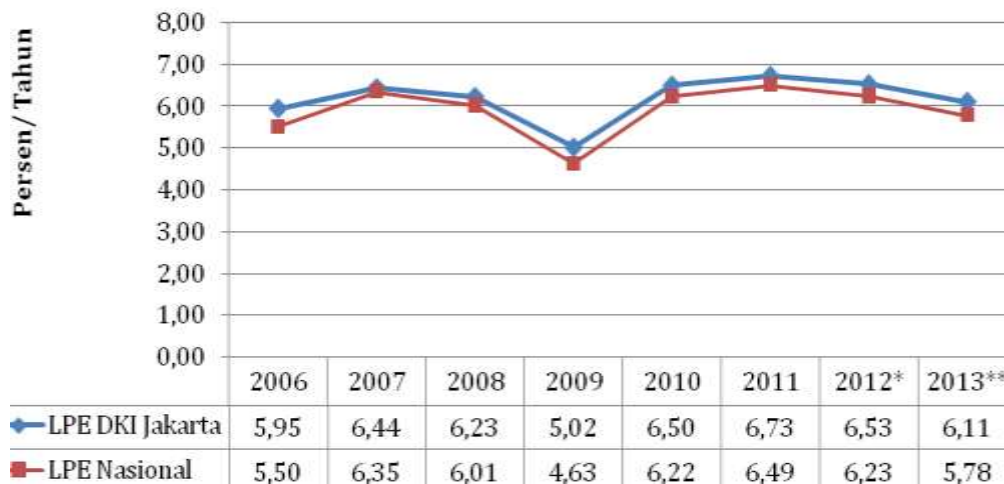
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian di Indonesia menunjukkan perkembangan fluktuatif dari tahun 2006 hingga 2013 dengan kecenderungan meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,19 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional (PDB Nasional) sebesar 5,90 persen (Gambar 1). Besarnya sumbangan output PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 27,85 persen terhadap pembentukan PDRB wilayah Pulau Jawa, dan 16,40 persen terhadap pembentukan output PDB Nasional. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.

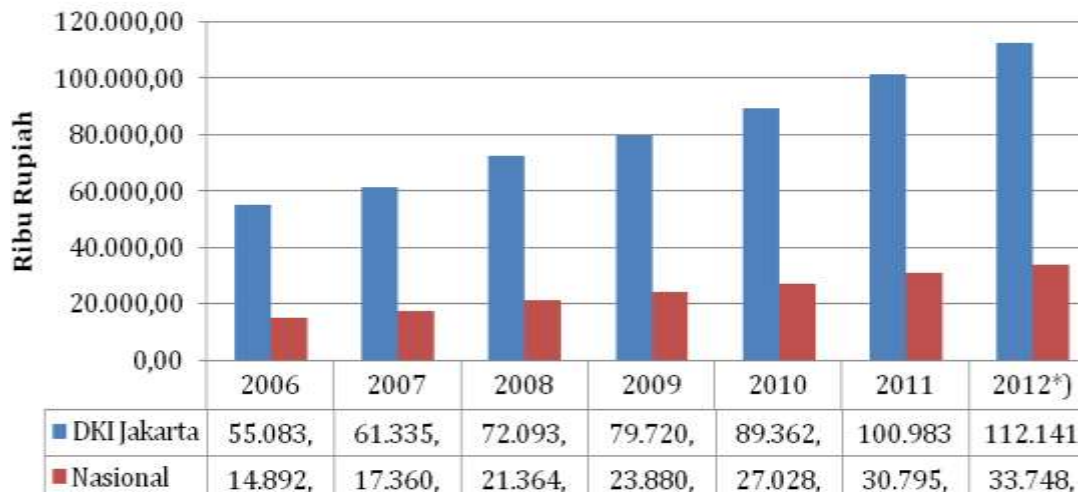
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di DKI Jakarta berada di atas rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk DKI Jakarta relatif baik secara nasional. PDRB per kapita DKI Jakarta cenderung meningkat, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di DKI Jakarta selama periode 2006 sampai tahun 2012 juga meningkat (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

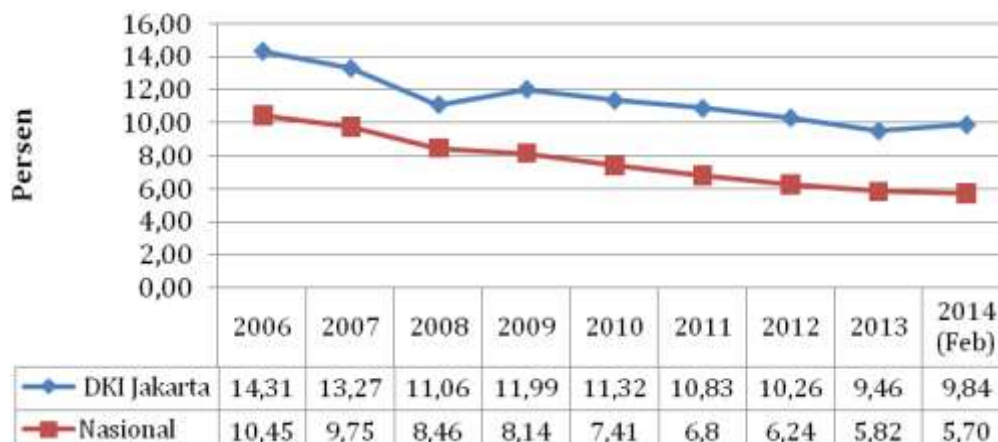


Sumber: BPS, 2013

2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta selama 2006-2013 berkurang sebesar 4,85 persen menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif selama 6 tahun terakhir belum berhasil menekan tingkat pengangguran secara signifikan (Gambar 3). Masih banyak angkatan kerja terdidik yang menganggur di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta yang berada di atas rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, yaitu sektor unggulan yang memiliki keterkaitan hulu hilir dan atau industri unggulan yang bersifat padat karya, serta lemahnya kemampuan wirausaha yang dimiliki oleh angkatan kerja. Diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

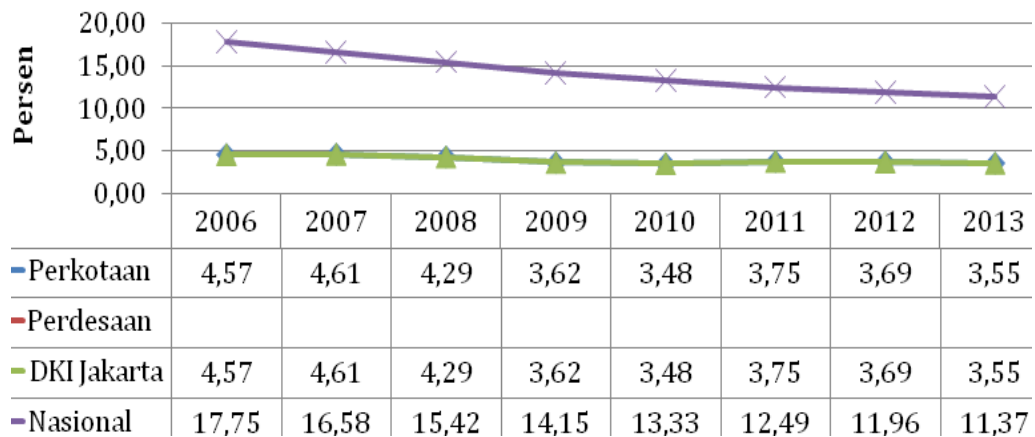


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Selama periode 2005-2012 persentase penduduk miskin DKI Jakarta berfluktuatif dan mencapai 3,55 persen pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan penduduk DKI Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan nasional walaupun pengangguran di provinsi ini relatif tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan (Gambar 4).

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

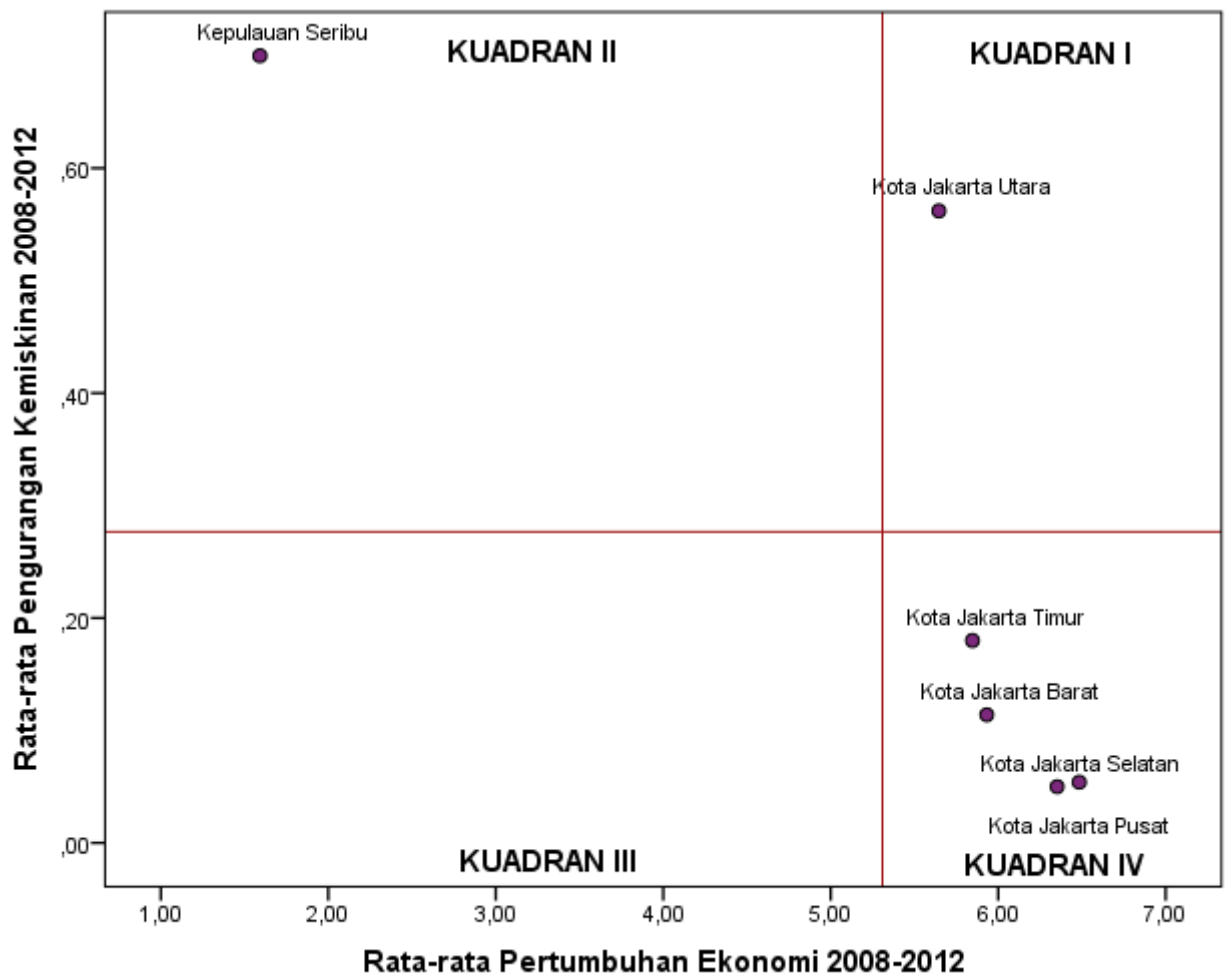
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kota Jakarta Utara terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jakarta Utara dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Pemerintah sebaiknya mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan usaha dalam pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Kepulauan Seribu terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DKI Jakarta (*low-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan

ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti kelautan, perikanan, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, tidak ada kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi.

Keempat, Kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat terletak di kuadran IV, merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberikan dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu diperlukan juga program dan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan.

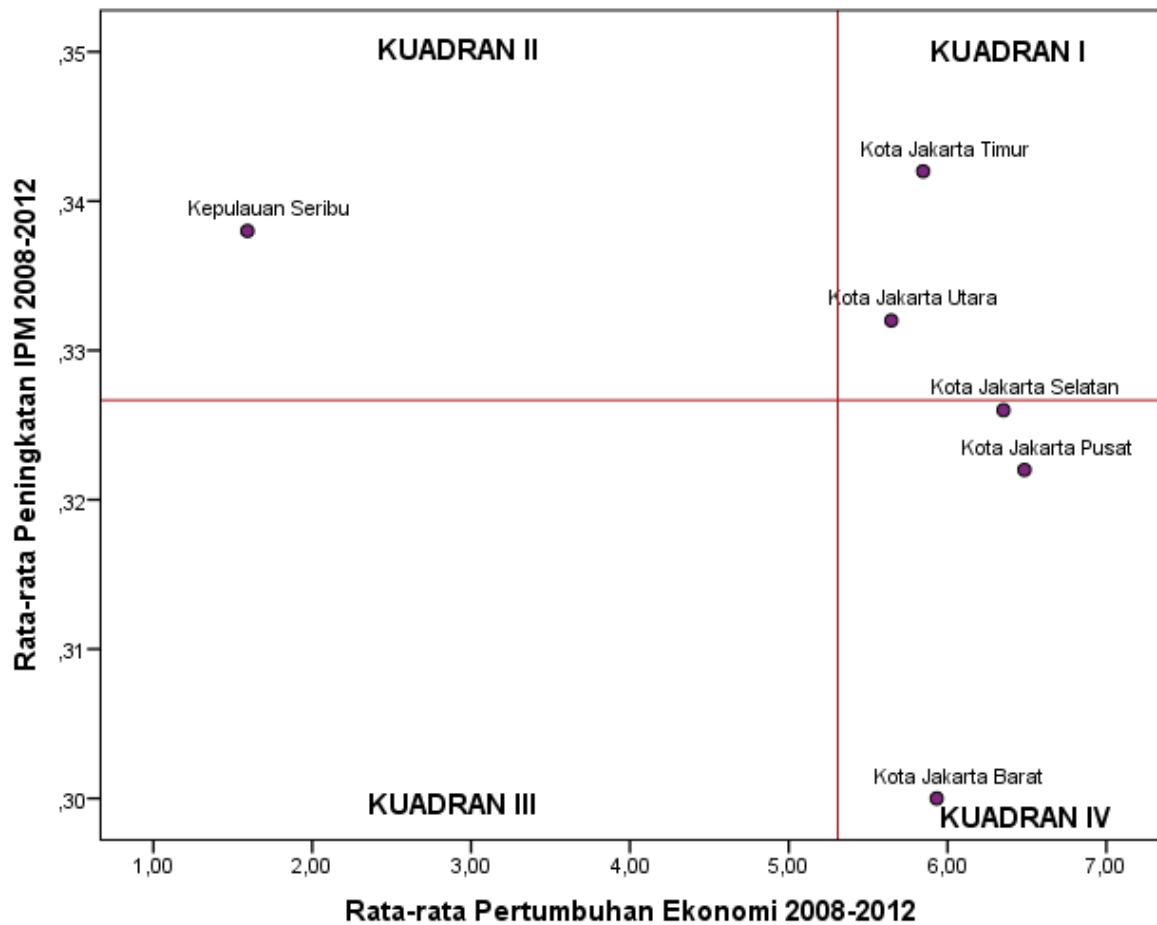
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di DKI Jakarta berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. Pertama, Kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Dalam kondisi ini tersirat bahwa pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Pemerintah tetap harus menjaga momentum pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kepulauan Seribu terletak di kuadran II termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi, namun peningkatan IPM di atas rata-rata (*low-growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti kelautan dan perikanan pertanian, dan perdagangan dan jasa.

Ketiga, tidak ada kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi di bawah rata-rata provinsi. Keempat, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat berada di kuadran IV, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



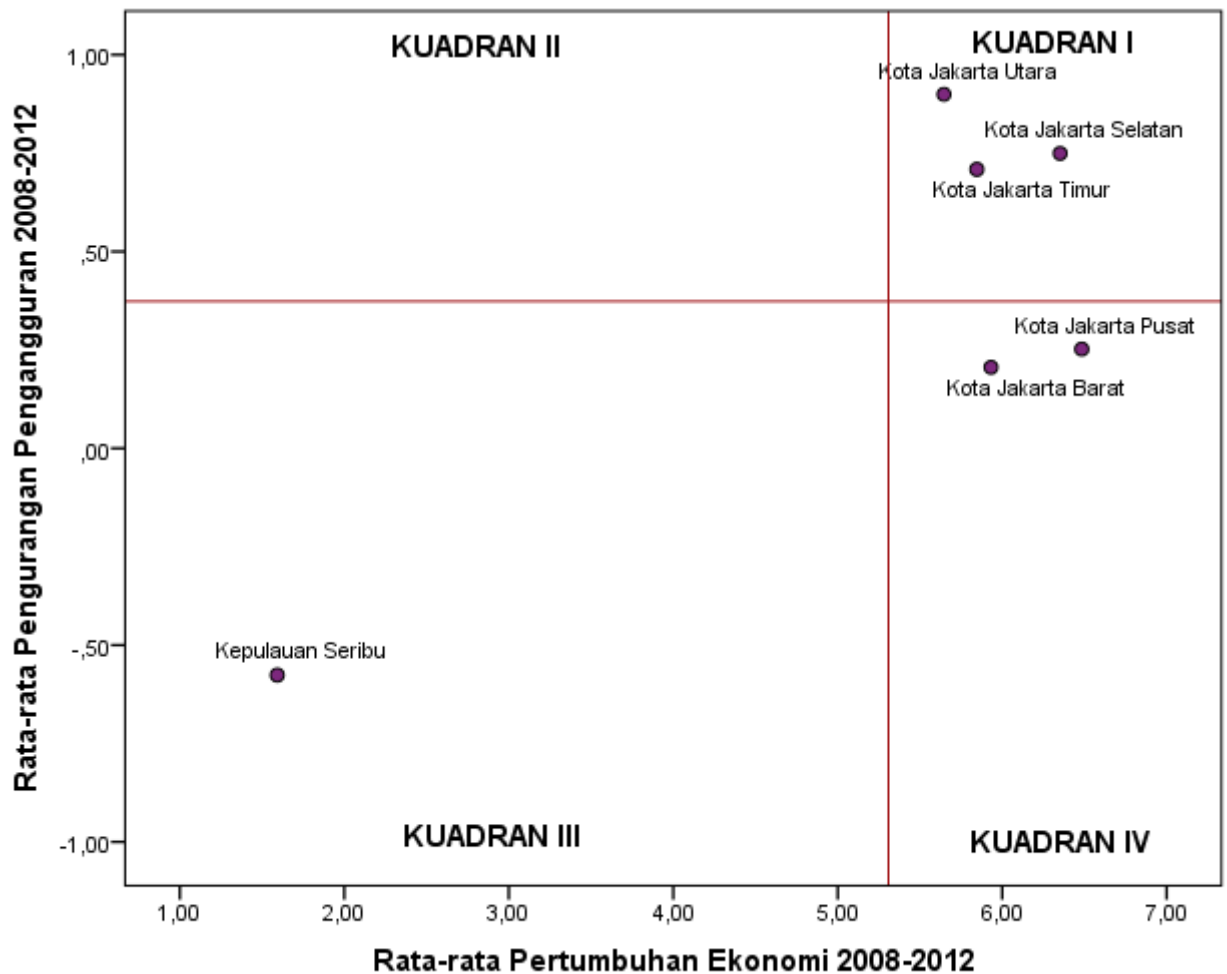
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, Kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur terletak di kuadran I merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Dalam kondisi ini pertumbuhan ekonomi mampu mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti perdagangan dan jasa.

Kedua, tidak ada kota yang terletak di di kuadran II dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Ketiga, Kabupaten Kepulauan Seribu terletak di kuadran III, termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less-pro job*). Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



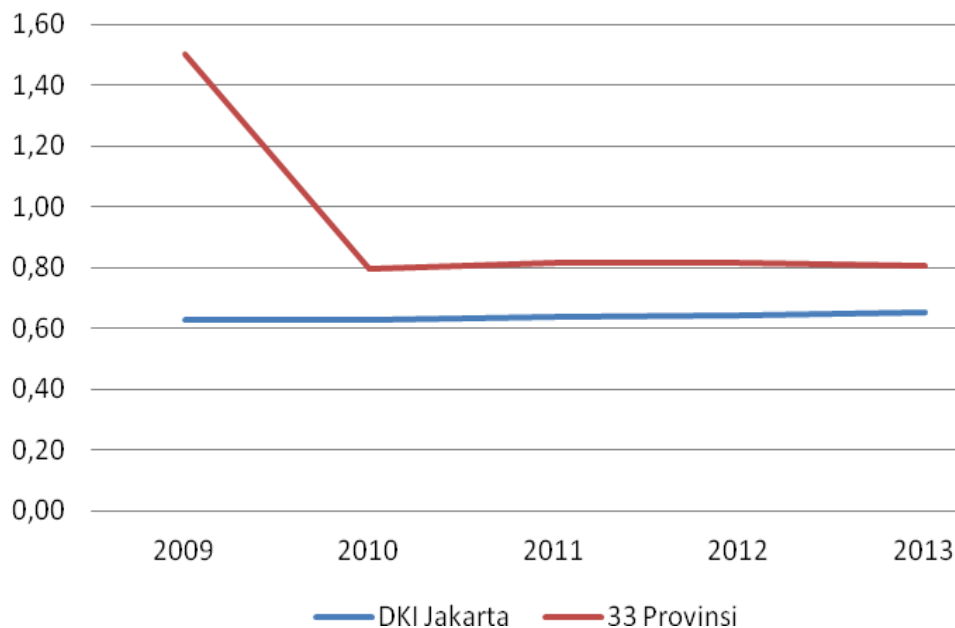
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat terletak di kuadran IV, merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata namun memiliki pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti sektor industri manufaktur, perdagangan dan jasa.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) Tahun 2007-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di provinsi DKI Jakarta cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kota Jakarta Pusat memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di provinsi DKI Jakarta (Tabel 1). Keberadaan Kota Jakarta sebagai ibukota negara turut mendukung tingginya pendapatan per kapita di daerah ini. Kepulauan Seribu memiliki tingkat PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan kota lain di Provinsi DKI Jakarta karena persebaran penduduk di daerah ini relatif sedikit apabila dibandingkan dengan kota-kota di Jakarta lain yang padat jumlah penduduknya.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Kep. Seribu	144.377	170.074	167.793	189.729	250.098	259.555
Kota Jakarta Selatan	65.017	75.769	83.154	91.647	104.158	116.162
Kota Jakarta Timur	38.537	44.702	48.964	54.360	60.850	67.631
Kota Jakarta Pusat	162.684	198.706	222.774	253.889	28.093	319.614
Kota Jakarta Barat	39.299	45.799	50.542	56.038	62.890	69.506
Kota Jakarta Utara	68.505	80.417	87.043	97.486	110.587	122.995
DKI JAKARTA	61.336	72.093	79.720	89.362	100.983	112.142

Sumber: BPS, 2012

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan Tinggi Pada Sektor Perdagangan

DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan menjadikan sektor keuangan memberi sumbangan terbesar dalam pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontributor terbesar terhadap PDRB selanjutnya adalah sektor perdagangan dan industri pengolahan (Tabel 2). Laju pertumbuhan terbesar selama tahun 2013 adalah pada sektor angkutan dan telekomunikasi, sementara itu sektor perdagangan menjadi sektor pertumbuhan terbesar. Sektor-sektor ekonomi dengan nominal besar tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi meskipun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	0.08	0.07
2.	Pertambangan	0.44	0.20
3.	Industri Pengolahan	15.23	13.65
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0.88	0.60
5.	Konstruksi	11.16	10.44
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	21.11	22.08
7.	Angkutan, Telekomunikasi	10.49	13.82
8.	Keuangan	27.75	27.21
9.	Jasa-jasa	12.85	11.94
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain sektor keuangan, angkutan dan telekomunikasi, jasa, dan perdagangan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$, mengindikasikan keunggulan komparatif dibandingkan daerah-daerah lain. Sektor keuangan merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi selama tahun 2008 hingga 2012. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan nasional menjadi salah satu pendorong sektor ini terus tumbuh. Kegiatan di sektor keuangan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Sementara itu sektor perdagangan yang semakin berkembang di DKI Jakarta didukung fasilitas yang relatif baik, dan meningkatnya volume perdagangan seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a. Tanaman Bahan Makanan	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
b. Tanaman Perkebunan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
c. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2. Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	0,62	0,60	0,59	0,57	0,55
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,67	0,66	0,64	0,62	0,59
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,92	0,84	0,83	0,83	0,81
a. Listrik	0,84	0,81	0,80	0,77	0,74
b. Gas	0,85	0,63	0,62	0,68	0,68
c. Air Bersih	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42
5. Konstruksi	1,63	1,61	1,60	1,62	1,61
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,25	1,28	1,26	1,23	1,22
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,16	1,20	1,17	1,14	1,13
b. Hotel	1,48	1,45	1,41	1,35	1,29
c. Restoran	1,71	1,69	1,75	1,79	1,83
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,25	1,24	1,26	1,29	1,31
a. Pengangkutan	1,08	1,05	1,04	1,03	1,02
1). Angkutan Rel	1,73	1,77	1,69	1,71	1,85
2). Angkutan Jalan Raya	1,15	1,14	1,16	1,17	1,17
3). Angkutan Laut	2,35	2,30	2,33	2,36	2,28
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5). Angkutan Udara	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,22	1,23	1,26	1,28	1,31
b. Komunikasi	1,40	1,38	1,40	1,45	1,47
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	3,04	2,99	2,95	2,90	2,84
a. Bank	3,95	3,91	3,80	3,68	3,52
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	3,13	3,04	3,06	3,05	3,02
c. Jasa Penunjang Keuangan	4,57	4,69	4,75	4,73	4,73
d. Real Estate	1,49	1,48	1,49	1,49	1,49
e. Jasa Perusahaan	3,44	3,38	3,34	3,32	3,33

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
9. Jasa-jasa	1,24	1,23	1,24	1,24	1,26
a. Pemerintahan Umum	0,70	0,69	0,67	0,65	0,65
b. Swasta	1,65	1,65	1,65	1,66	1,68
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	2,08	2,05	2,05	2,05	2,04
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	2,62	2,75	2,98	3,19	3,45
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	1,38	1,36	1,35	1,34	1,34

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sektor-sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan (34,81 persen), industri pengolahan (14,65 persen), dan jasa-jasa (23,96 persen). Selama tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2014 sektor keuangan menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor lainnya (Tabel 4). Perubahan jumlah tenaga kerja yang meningkat di sektor keuangan dikarenakan DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu kegiatan di sektor keuangan akan semakin meningkat seiring meningkatnya seluruh sektor ekonomi yang mendukung perdagangan dan bisnis.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	23,691	101,577	77,886
2	Pertambangan	17,643	10,707	-6,936
3	Industri Pengolahan	603,903	685,494	81,591
4	Listrik, Gas, Air	14,407	15,551	1,144
5	Bangunan	165,481	199,594	34,113
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	1,458,969	1,628,861	169,892
7	Angkutan & Telekomunikasi	399,272	420,223	20,951
8	Kuangan	296,373	495,850	199,477
9	Jasa-Jasa	1,229,166	1,120,981	-108,185
	Total	4,208,905	4,678,838	643,574

Sumber : BPS, 2014

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 pada konsumsi rumah tangga, ekspor, impor. Tinjauan struktur PDRB menurut komponen pengeluaran menunjukkan alokasi penggunaan PDRB yang tercipta di suatu daerah pada satu kurun waktu tertentu. Pembentukan Modal Tetap Bruto (pangsa investasi) sebesar 37,98 persen, menunjukkan DKI Jakarta sebagai daerah industri dengan peran ekspor relatif tinggi (Tabel 5). Nilai impor yang tinggi dapat berperan positif apabila

dimanfaatkan untuk investasi. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi.

Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pada tahun 2009-2013 impor, konsumsi rumah tangga, dan ekspor masih menjadi sumber utama pertumbuhan daerah. Secara kumulatif, laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 terbesar pada komponen konsumsi pemerintah. Tingginya laju pertumbuhan komponen ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	54,93	51.33
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,95	1.19
3.	Konsumsi Pemerintah	9,62	4.64
4.	PMTB	37,98	36.55
5.	Perubahan Stok	0,69	0,56
6.	Ekspor	56.19	68,62
7.	Impor	61,35	62,89
Total		100.00	100.00

Sumber : BPS, 2013

Persentase ekspor dan impor di DKI Jakarta cukup tinggi dikarenakan banyaknya kegiatan industri yang terkonsentrasi di provinsi ini. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Sementara itu, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah. Kegiatan investasi bertujuan meningkatkan produksi, penyempurnaan struktur industri, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemerataan pendapatan.

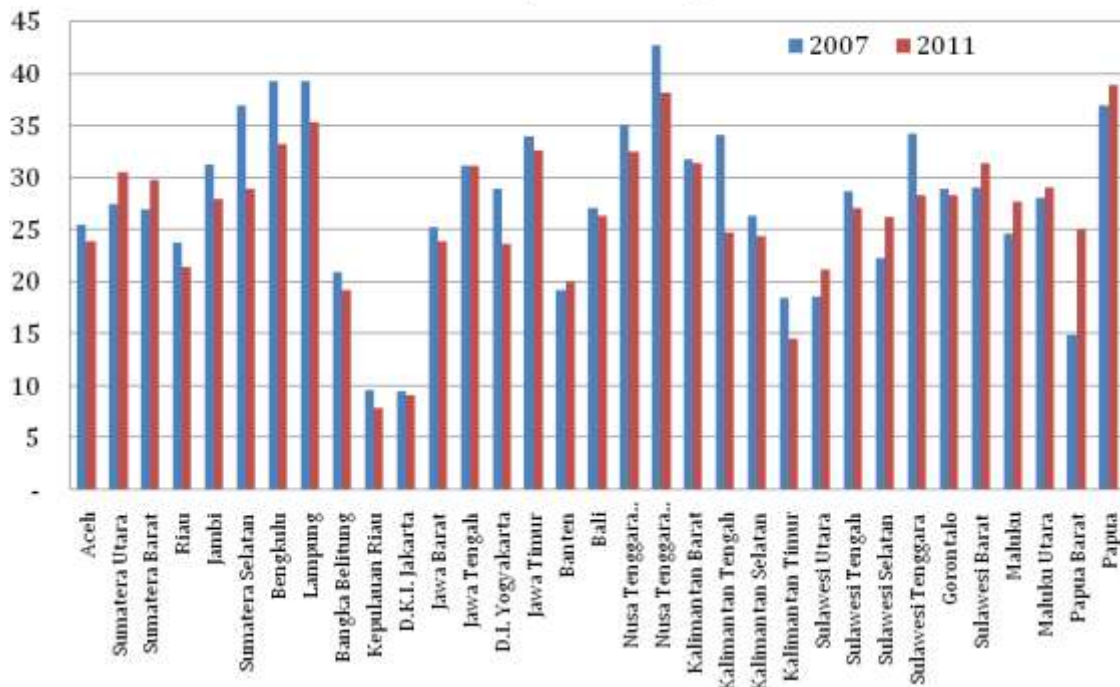
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan

konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di DKI Jakarta secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja yang tercipta selama kurun waktu 2007-2011 di DKI Jakarta relatif menurun. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dimungkinkan mengalami peningkatan, baik yang bekerja sendiri maupun dibantu dengan anggota keluarga. Rendahnya kualitas lapangan kerja dan tingginya kemiskinan daerah menjadi salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita. Ini bisa dilihat dari jumlah pekerja informal, yaitu pekerja yang terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit guncangan ekonomi yang terjadi.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Perkembangan tingkat pekerja yang kurang berkualitas di DKI Jakarta persentasenya menurun dari tahun 2007 ke 2011, yaitu dari sebesar 9,55 persen pada tahun 2007 menjadi sebesar 9,08 persen pada tahun 2011 (Gambar 9). Persentase ini relatif jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 27,60 persen pada tahun 2011. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama.

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. DKI Jakarta dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 7094 km. Ketersediaan jaringan jalan di DKI Jakarta diukur dari kerapatan jalan tergolong baik dan dengan kerapatan jalan tertinggi di Indonesia (Tabel 6).

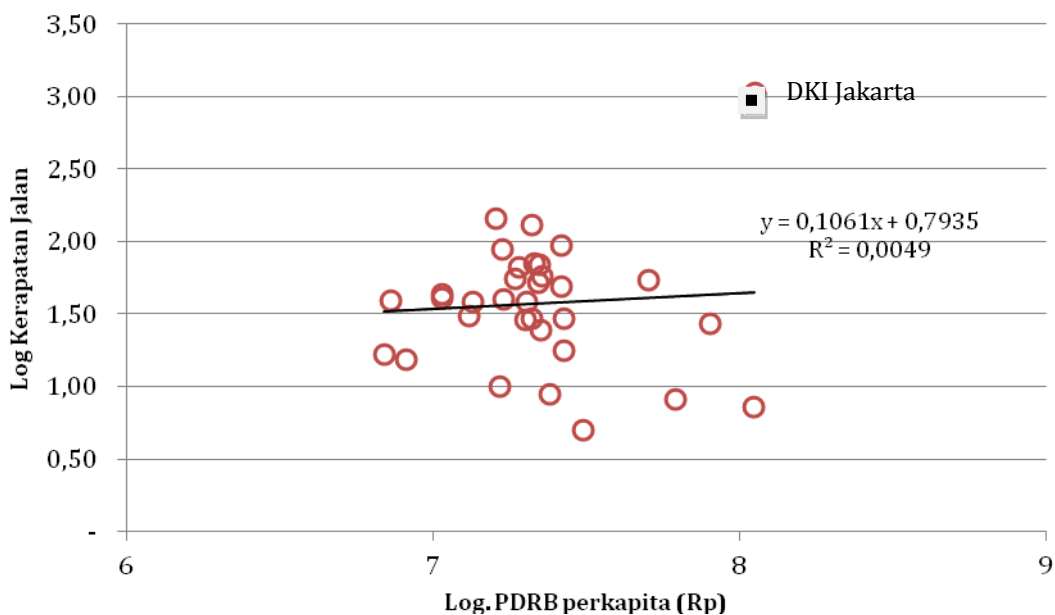
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan untuk seluruh provinsi di Indonesia, posisi Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan (Gambar 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Provinsi yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu wilayah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi DKI Jakarta dalam diagram ini berada jauh di atas kurva. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas kerapatan jalan di Provinsi DKI Jakarta di atas rata-rata tingkat kerapatan jalan provinsi lain di Indonesia.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi DKI Jakarta kurang baik karena sekitar 62 persen yang sudah beraspal (Tabel 7). Dari seluruh jalan yang ada di DKI Jakarta, 100 persen jalan negara dalam kondisi baik, namun kondisi jalan provinsi dan kabupaten, masing-masing hanya 51 persen dan 38 persen yang berada dalam kondisi baik. Tingginya tingkat kerusakan jalan ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal.

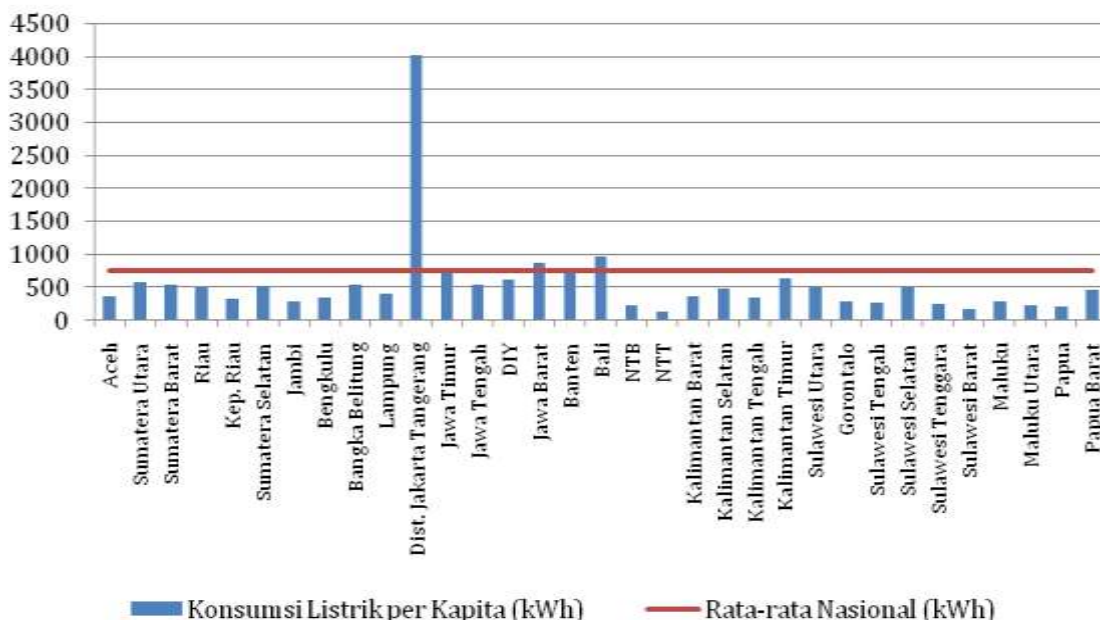
Tabel 7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
DKI Jakarta	4314	62	0	0	0	0	2637	38	6951	100
Jawa	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

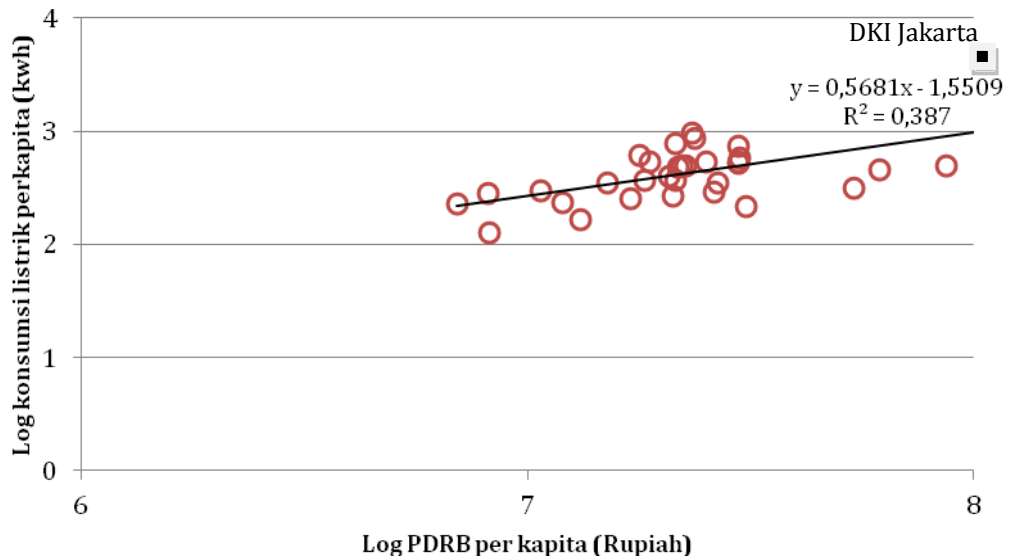
Ketersediaan infrastruktur lain seperti listrik di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan membandingkan kondisi di 34 provinsi, konsumsi listrik perkapita di DKI Jakarta berada jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi secara nasional. Konsumsi energi listrik per kapita di Jakarta sebesar 4005,80 kWh, sedangkan rata-rata konsumsi listrik per kapita nasional sebesar 753,70 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). provinsi yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. DKI Jakarta memiliki posisi jauh di atas kurva linier, menunjukkan provinsi DKI Jakarta tidak mengalami defisiensi infrastruktur listrik

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

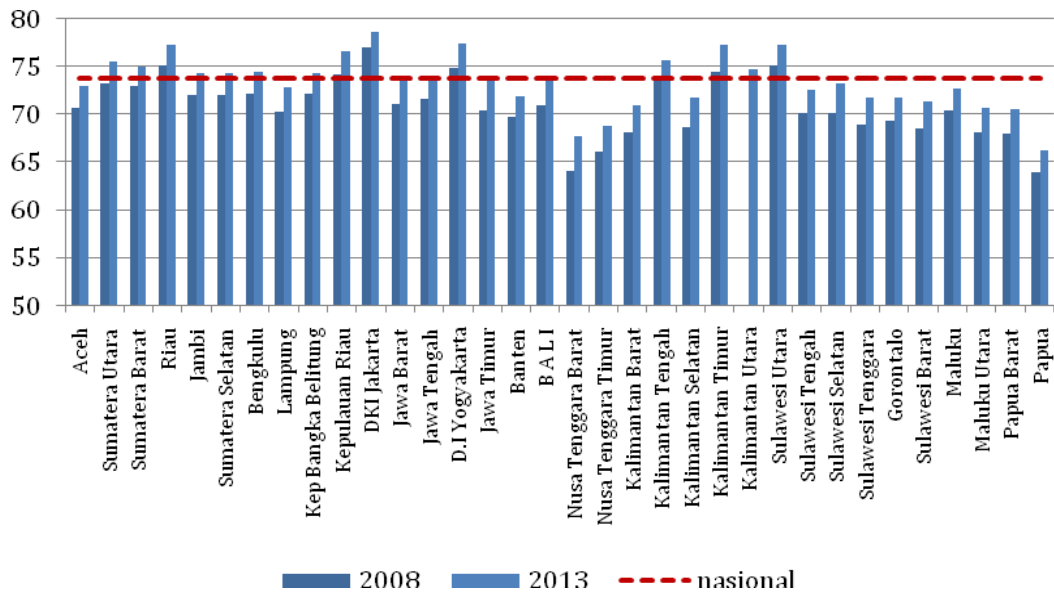


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di DKI Jakarta bukan menjadi masalah utama karena IPM DKI Jakarta tertinggi nasional Tahun 2013. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di DKI Jakarta yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan selalu berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM DKI Jakarta menduduki peringkat pertama secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 78,59. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 72,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 73,6 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta meningkat dari 10,8 tahun pada 2008 menjadi 11,0 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di DKI Jakarta pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 98,8 menjadi 99,2 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 94,14.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 56,10 persen pada tahun 2008 menjadi 88,01 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan angkatan kerja di DKI Jakarta relatif berkualitas.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	1.105.949	902.076	(203.873)
2	SMTP	989.197	824.563	(164.634)
3	SMTA Umum	1.888.001	2.261.584	373.583
5	Diploma I/II/III/Akademi	260.690	291.302	30.612
6	Universitas	528.640	909.751	381.111
Total		4.772.477	5.189.276	416.799

Sumber: BPS, 2014

6. Tabungan Masyarakat

Tabungan yang dihimpun bank umum dan BPR lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan banyaknya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif melalui fungsi intermediasi perbankan. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR relatif konstan dari 0,48 pada tahun 2005 dan tahun 2007 menjadi 0,58 pada tahun 2009, dan 0,62 pada tahun 2013. Rasio tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,92 pada tahun 2013 (Tabel 9). Rasio pinjaman terhadap simpanan di DKI Jakarta yang masih di bawah rata-rata nasional menunjukkan kegiatan investasi di Provinsi DKI Jakarta ditentukan oleh simpanan masyarakat.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
DKI Jakarta	1.750.127	1.090.391	0.62	0.24
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0.84	0.42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0.92	0.47

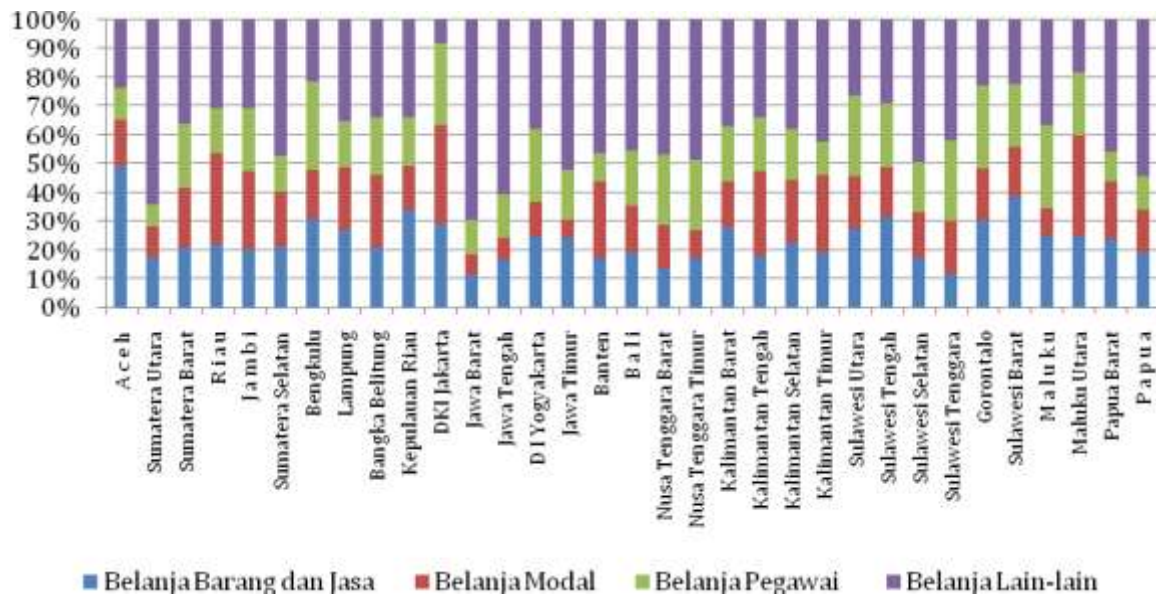
Sumber: BPS, 2013

Rasio investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat di DKI Jakarta sebesar 0,24 (Rasio PMTB < 1), menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.

7. Kualitas Belanja Daerah

Peran pemerintah dalam investasi di daerah sangat penting walaupun porsi relatif lebih kecil dibandingkan dengan swasta. Investasi pemerintah umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non-excludable* dan atau *non-rivalry* Pada sektor-sektor seperti ini swasta tidak tertarik untuk membangunnya. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal karena peran swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya. Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Terkait dengan hal ini komitmen pemerintah daerah DKI Jakarta dalam memprioritaskan investasi publik relatif tinggi. Hal ini terlihat dari relatif tingginya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja (pemerintah kabupaten/kota dan di Provinsi DKI Jakarta). Berdasarkan data ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di DKI Jakarta mencapai 44,75 persen, sedangkan porsi belanja pegawai mencapai 18,37 persen (Gambar 14).

Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian sehingga komposisi belanja pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih mengarah pada belanja modal. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Pertumbuhan daerah DKI Jakarta memiliki prospek baik, dengan didukung beberapa modal pembangunan yang dimiliki, seperti kesenjangan internal yang relatif rendah dan prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Jawa. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,33 menjadi 0,43, sementara itu indeks gini nasional juga meningkat dari 0,35 menjadi 0,4. Rendahnya tingkat kesenjangan

ekonomi akan mendukung upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi RPJMN 2015-2019 sebesar 5,4 – 7,9 persen pada tahun 2019 dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menguat di tahun 2015. Investasi diperkirakan membaik di tahun 2015 setelah pemerintahan baru memaparkan kebijakan dan mendorong kembali bidang infrastruktur. Investasi bidang infrastruktur seperti proyek pembangunan MRT, kereta bandara, perluasan pelabuhan dan jalan layang di Tanjung Priok, serta proyek lain merupakan infrastruktur berskala besar yang mulai direalisasikan.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 sebesar 3,4 – 2,5 persen. Isu kemiskinan di Jakarta bukan hanya kemiskinan absolut, namun juga ukuran kemiskinan lain. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 3,72 persen, dibandingkan dengan Maret 2013 sebesar 3,55 persen atau meningkat sebanyak 0,17 poin. Apabila dibandingkan dengan September 2012 jumlah penduduk miskin mencapai 3,70 persen atau meningkat sebanyak 0,02 poin. Tingginya angka kemiskinan relatif di DKI Jakarta juga konsisten dengan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan dari angka indeks gini 0,44 pada tahun 2011, 0,42 pada tahun 2012, dan 0,43 pada tahun 2013. Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras mengatasi kemiskinan agar target RPJMN 2015-2019 dapat tercapai.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah DKI Jakarta maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kualitas sarana dan prasarana transportasi

- b. Pengembangan sektor unggulan daerah: industri pengolahan, keuangan, jasa, dan perdagangan;
- c. Pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- d. Peningkatan investasi di daerah;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah;
- h. Pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, seperti perbaikan kualitas jalan dan jembatan dan pengembangan angkutan umum massal;
- b. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Pemerataan akses pendidikan terutama pendidikan menengah, dan kesehatan;
- e. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.
- g. Peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pengelolaan urbanisasi dan tata ruang.